



Arif Akbarul Huda, SSI MEng
Dosen Prodi Informatika
Universitas Amikom Yogyakarta

MUMPUNG gratis, bagaimana tips menyelesaikan banyak online course sekaligus?. Dilonatkan oleh Mahasiswa dalam sebuah forum, barangkali pertanyaan ini juga mewakili banyak orang. Namun belum selesai saya menjawab, disusul pertanyaan berikutnya. “Ada banyak hal baru, lalu apa yang harus saya

pelajari dulu?” dan lagi “Apa saya harus menghapus semua sosmed supaya bisa kembali fokus?” Pertanyaan bertubi-tubi ini, kebetulan persis seperti yang sedang saya alami. Fenomena ini saya menyebutnya sebagai Information Overload, kondisi dimana kita bukannya kekurangan akses informasi, melainkan justru kebanyakan.

Bicara soal online course, betapa banyak platform penyedia konten menawarkan obral harga terutama dalam rangka menyambut era adaptasi baru. Sebut saja Coursera dan UdeMy. Siapa yang tidak tertarik, berbagai konten berkualitas diproduksi oleh Universitas dan Industri kelas dunia. Dalam perspektif bisnis, tentu hal ini momentum bagi

penyedia konten manapun untuk mengakuisisi konsumen sebanyak mungkin. Sebaliknya, bagi konsumen momentum ini ditunggu-tunggu untuk dapat menikmati konten berbayar secara gratis.

Kembali pada information overload, seharusnya sebagai manusia merdeka kita tidak boleh terjebak pada paradigma ini. Manusia jauh lebih pandai dalam olah pikir dan rasa. Kita harus bisa mengendalikan arus informasi, sesuai porsi dan kebutuhan. Bukan sebaliknya, derasnya arus informasi membuat kita seolah-olah harus mengikuti tren. Jangan sampai gara-gara terseret arus informasi dari internet, kita jadi bersikap tahu segalanya seperti Bu Tejo yang sedang viral. Teruntuk bagi civitas

akademik baik siswa, mahasiswa, guru ataupun dosen tentunya lazim memerankan teknologi sebagai alat pendukung proses belajar. Namun itu bukan segala-galanya, lho ya!. Mas Rama tidak harus sama seperti Mbak Ning yang bisa melahap habis online course dalam waktu singkat. Karena bagi Mas Rama, belajar online itu membosankan dan bikin ngantuk.

Namun konsekuensinya Mas Rama harus menemukan sendiri cara belajar yang efektif. Misalnya, Mas Rama merasa kegiatan belajarnya sangat produktif apabila (1) menemukan konteks yang tepat, (2) menyampaikan kembali dalam bentuk lain seperti tulisan, vlog atau podcast (3) menemukan lingkungan

komunitas yang pas dan (4) menemukan sosok inspirasi yang relevan. Sayangnya formula ini belum tentu cocok bagi Anda, sehingga Anda juga harus menemukan sendiri formula belajar yang efektif.

Mengutip pesan Bu Tejo (Film Pendek Tilik 2018), memiliki handphone jangan hanya untuk bergaya melainkan juga untuk mencari informasi. Tapi jangan kebalasan, secukupnya saja.

Menengok smartphone sebenarnya cukup dilakukan saat ada notifikasi. Faktanya tak ada notifikasipun rasanya ingin mengetuk lock screen pada layar smartphone setiap saat. . Sepuluh tahun yang lalu, notifikasi itu fitur yang sangat berharga. Namun sekarang, beberapa orang bahkan beranggapan notifikasi justru



mengganggu sehingga harus dinon-aktifkan.

Melihat Instagram sebentar saja sebenarnya sudah cukup, sekedar tau informasi terkini. Namun kenyataannya, kalau sudah masuk kedalam aplikasi rasanya pingin scroll lagi, lagi dan lagi. Begitu pula dengan Facebook, Tiktok, Online Course dan Youtube. Sedikit saja sebenarnya sudah cukup, namun kenyataannya nambah terus seperti ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Hingga tak terasa berjam-jam kita habiskan waktu didepan gawai. Seolah-olah sibuk tapi tidak produktif. Inilah bahaya laten jika kita serakah digital. ***

SEPAKBOLA PUTRA

Bantul dan Sleman Catat Kemenangan



KR-Antri Yudiansyah

Pemain Sleman, Ronan Aryo (hijau) duel dengan pemain Gunungkidul dalam laga terakhir babak penyisihan, kemarin.

SLEMAN (KR) - Tim Bantul dan Sleman sukses mencatatkan kemenangan pada laga terakhir babak penyisihan sepakbola putra di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (7/9) kemarin. Partai final sepakbola putra akan berlangsung, Jumat (9/9) pagi.

Bantul memenangi duel melawan Ku-

lonprogo dengan skor 3-1. Tiga gol Bantul disarangkan Riyyant Fadhil menit 14, M Rizky Ramadhan menit 38 dan Dwi Pilihanto Nugroho menit 52. Satu gol Kulonprogo dicetak Zaidan menit ke 57.

Sedang Sleman mengalahkan Gunungkidul dengan skor 4-0 pada laga terakhir babak penyisihan. Tampil efektif,

Sleman menggertak dengan cepat. Namun butuh 23 menit bagi Sleman mencetak gol keunggulan. Gol dilesakkan Lintang Aryo Jagadiputro menit ke 23.

Gunungkidul besutan Suwarto berusaha memperbaiki permainan. Namun, jala Gunungkidul yang dijaga Andika Wahyu Tirta kembali jebol menit 40. Lintang Aryo Jagadiputro mencetak gol keduanya. Keunggulan Sleman 2-0 bertahan hingga turun minum.

Babak kedua, Sleman tak menurunkan tempo serangan. Tim besutan eks pemain PSS Sleman, Kahudi Wahyu terus menekan. Lintang Aryo menjadi bintang kemenangan Sleman. Lintang menambah dua gol di babak kedua menit 56 dan 71 untuk membawa Sleman unggul 4-0.

Atas hasil ini, Kota Yogya, Bantul dan Sleman sama-sama mengoleksi poin yang sama, delapan. Hasil dua kali menang dan dua kali imbang. Hingga, Rabu (7/9) tadi malam, belum dipastikan oleh Panpel Sepakbola Porda XVI DIY, siapakah yang lolos ke babak *grandfinal* sepakbola putra.

Kamis (8/9) pagi ini akan dipertandingan partai perebutan medali emas sepakbola putri antara Sleman melawan Bantul. (Yud)-f

Sambungan hal 1

Tarif

Untuk batas atas dari Rp 2.300 naik menjadi Rp 2.500 (naik 8,7 persen), dan biaya jasa minimal menjadi Rp 8.000-Rp 10.000.

Sementara untuk Zona II terjadi kenaikan biaya batas bawah sebesar 13,33 persen dan batas atas 6 persen jika dibandingkan dari KP 548 Tahun 2020. “Untuk Zona II yaitu dari KP 548 Tahun 2020 batas bawah Rp 2.250 naik menjadi Rp 2.550, untuk batas atas dari Rp 2.650 naik menjadi Rp 2.800. Jadi ada kenaikan batas bawah 13 persen, batas atas 6 persen, dan biaya jasa minimal Rp 10.200-Rp 11.200,” kata Hendro.

Sedangkan untuk Zona III batas bawah dari Rp 2.100 naik menjadi Rp 2.300 (naik 9,5 persen), batas atas dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750 (naik 5,7 persen), dan biaya jasa minimal Rp 9.200-Rp 11.000. Pembagian zonasi ini masih sama seperti sebelumnya yaitu Zona I meliputi: Sumatera, Jawa (selain

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Zona III meliputi: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, dan Papua.

“Untuk biaya jasa minimal disesuaikan berdasarkan jarak 4 kilometer pertama. Untuk besaran biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi ditetapkan paling tinggi 15 persen. Jadi ada penurunan kemarin 20 persen kita turunkan menjadi 15 persen. Waktu pelaksanaan kenaikan ini diberi waktu tiga hari sejak tanggal penetapan keputusan ini,” jelas Hendro.

Tak hanya tarif ojek online, Kemenhub juga memberlakukan penyesuaian terhadap tarif bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Kelas Ekonomi. “Kenaikan tarif angkutan AKAP Kelas Ekonomi perlu penyesuaian biaya angkutan yaitu kenaikan harga BBM, biaya awak bus yaitu

kenaikan UMP, iuran kesehatan dan ketenagakerjaan (Jamsostek), dan penyesuaian harga kendaraan serta sparepart,” kata Hendro.

Menurutnya sejak 2016 belum ada kenaikan tarif bus AKAP Kelas Ekonomi. Seiring naiknya harga BBM, perlu ada kenaikan tarif bus AKAP Kelas Ekonomi. “Tarif dasar untuk 2022 sebesar Rp 159 perpenumpang perkilometer. Ada kenaikan dari tarif dasar tahun 2016 yang hanya Rp 119 perpenumpang perkilometer,” jelas Hendro.

Untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) berlaku tarif batas atas Rp 207 perpenumpang perkilometer, tarif batas bawah Rp 128 perpenumpang perkilometer. Sedangkan Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur) berlaku tarif batas atas Rp 227 perpenumpang perkilometer dan tarif batas bawah Rp 142 perpenumpang perkilometer. (lmd)-f

Sambungan hal 1

Percepat

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan, dirinya akan mendukung pencapaian target-target prioritas yang telah dicanangkan Pemerintah. “Termasuk misalnya target prioritas, bagaimana birokrasi terlibat sungguh-sungguh di penanganan kemiskinan, stunting, dan seterusnya. Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi, termasuk birokrasi yang melayani,” ujar Azwar Anas.

Secara khusus, Menteri PAN-RB

menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendorong digitalisasi dan integrasi program dan kegiatan Pemerintah, di antaranya program pengentasan kemiskinan ekstrem serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Beliau sudah menyampaikan sudah banyak anggaran kemiskinan, misalnya ada Rp 502 triliun di 16 kementerian/lembaga. Kalau ini diintegrasikan, maka hasilnya akan mendorong target pencapaian sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tambah Azwar Anas.

Azwar Anas juga menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan perlu ada langkah-langkah bersama dengan kementerian/lembaga dan daerah ya, karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci. Termasuk arahan beliau tadi, bagaimana pelayanan publik ini, termasuk jemput bola ke masyarakat itu menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan,” ujar Menteri PAN-RB. (Sim)-f

Sambungan hal 1

'Abuse

Padahal sesuai dengan hirarkhi perundang-undangan kita ketahui bahwa peraturan presiden (perpres) itu tingkat/derajatnya dibawah undang-undang. Artinya, semua aturan yang berada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Maka, perpres tidak bisa berlawanan dengan undang-undang.

Jelas, karena masyarakat awam tidak tahu isi dan tidak ada yang mengusik apalagi menghebohkan. Sehingga sejak aturan itu diterbitkan tidak ada satupun perorangan maupun lembaga yang peduli dan memperhatikan keberadaan peraturan tersebut. Akibatnya, tidak ada yang terfikir untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

Inilah yang menyebabkan *abuse of power* ‘demikian mudah’ dilakukan polisi bahkan akan menabrak siapa pun yang dianggap mengganggu kinerjanya. Sehingga Indonesia Police Watch mengang-

gapnya sebagai bentuk melampaui peran fungsi dan Tupoksi Poli. Bagaimanapun, *abuse of power* adalah merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dari yang memiliki kewenangan kepada seorang atau lebih yang berada dibawah kekuasaan nya

Jika terkait kasus Sambo, lantas bagaimana? Bareskrim Mabes Polri mengatakan ada tindakan *abuse of power* yang dilakukan Sambo kepada bawahannya. Yakni perintah kepada bawahan atau orang yang berada di bawah pengawasan dan penguasaannya untuk melakukan tindakan yang bisa jadi sejatinya melawan hukum atau bertentangan dengan aturan hukum. Dan orang yang berada dibawah penguasaannya itu tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintahnya tersebut. Sehingga tidak heran bukan, jika kasusnya kemudian menyeret puluhan orang?

Mari kita tunggu hasil akhir dari kasus

tersebut. Dalam pembunuhan Brigadir Josua, akan kita lihat nanti apa sejatinya motif pembunuhan, hingga bagaimana fakta kejadian yang sebenarnya? Semata agar kesimpangsiuran di lingkungan institusi kepolisian ini segera menemukan *ending* yang baik. Tentu juga agar institusi tidak terpasung dengan kasus Sumbro.

Tahap awal telah sudah diputuskan Dewan Etik Kepolisian bahwa Irjend (Pol) Fredy Sambo dinyatakan terbukti melanggar etik kepolisian dan perbuatan tercela, sehingga diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi kepolisian. Kalau dia mengatakan mau banding, silakan. Bukankah masih ada kasus pidana yang menyebabkan kematian Brigadir Josua yang menunggu pengajuan ke persidangannya? Ini harus dikawal ketat. Semoga keadilan tetap ditegakkan meski langit runtuh.

(Penulis adalah Vice Presiden Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia)-f

TAK LAMA SETELAH DILANTIK

Seorang Kades Ditemukan Gantung Diri

TEMANGGUNG (KR) - Kepala Desa (Kades) Tanjungsari Kecamatan Bejen Temanggung, Jiyanto (49) ditemukan meninggal di area kebun miliknya, Rabu (7/9) pagi. Kepolisian Resort (Polres) Temanggung menduga kades yang baru dilantik Kamis (1/9) lalu bersama 36 Kades lainnya itu, meninggal karena gantung diri dengan cara menjerat leher menggunakan tali dan mengikatnya pada sebuah pohon rambutan.

Keterangan yang diperoleh dari lokasi kejadian perkara menyebutkan, kali pertama Jiyanto ditemukan oleh anggota keluarganya, karena yang bersangkutan tak ada di rumah.

Anggota keluarga menemukan Kades Jiyanto tergantung di pohon rambutan yang berada di belakang rumahnya sekitar pukul

05.15 WIB. Warga kemudian menghubungi Kepolisian Sektor (Polsek) Bejen.

Kasi Humas Polres Temanggung AKP An Fajar membenarkan kejadian tersebut. Kepolisian melalui Inafis Polres dan petugas dari Puskesmas setempat kemudian melakukan visum et repertum atau pemeriksaan luar pada jenazah.

“Dugaan kuat memang bunuh diri, petugas tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan, sementara dari kemaluan keluar air mani,” katanya.

Kepolisian menyarankan untuk otopsi agar diketahui dugaan kepastian kematiannya, tetapi pihak keluarga menolak dan menerima kejadian tersebut. Jenazahnya pun kemarin dimakamkan. (Osy)-f

Agus

Sambungan hal 1

Dedi mengatakan ada tiga peran Kombes Pol Agus Nur Patria dalam perkara *obstruction of justice* yakni melakukan perusakan CCTV yang ada di pos Satpam TKP Duren Tiga. Kedua, di dalam melakukan olah TKP ada hal yang tidak profesional yang dilakukan dan ketiga ada pemufakatan bersama enam tersangka lainnya untuk melakukan penghalang-halangan pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J.

Seperti diketahui, ada tujuh anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka *obstruction of justice*, selain Kombes Pol Agus Nur Patria, enam tersangka lainnya, yakni mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, mantan Karopaminal Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam

Polri AKBP Arif Rahman Arifin. Kemudian, mantan Ps Kasubbagriksa Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Baiquini Wibowo, mantan Ps Kasubbagaudit Baggak Etika Powabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuk Putranto dan mantan Kasub Unit I Sub Direktorat III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.

Dari tujuh tersangka, empat sudah menjalani sidang etik, Ferdy Sambo, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Agus Nur Patria. Keempatnya mengajukan banding sesuai haknya yang diatur dalam Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Saat ini tersisa tiga tersangka yang menunggu giliran untuk disidang etik, yakni Hendra Kurniawan, Irfan Widyanto dan Arif Rahman Arifin. (Ant/Obi)-f

Presiden

Sambungan hal 1

Presiden Jokowi juga mengatakan belum menerima surat pengunduran diri Mardiono. “Belum (terima), di Pak Mensesneg saja belum, apalagi ke saya,” ungkap Presiden.

Pergantian Ketua Umum PPP merupakan buntut dari pernyataan Suharso Monoarfa mengenai isu amplop kiai yang diutarakannya dalam acara pembekalan kader PPP oleh KPK pertengahan Agustus lalu.

Pada Selasa (6/9), sejumlah pengurus PPP juga sudah menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil mukernas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Berkas itu diserahkan langsung oleh Muhammad Mardiono didampingi sejumlah elite pimpinan partai berlambang Kakbah

tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang ikut mendampingi Mardiono mengatakan, berkas kepengurusan baru yang diserahkan hanya perubahan pada ketua umumnya saja yaitu pergantian Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono.

Namun, Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menolak hasil mukernas tersebut dan menegaskan, ia masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan ketentuan AD/ART partai.

Sebagai Ketua Umum PPP, Suharso mengatakan selalu bekerja keras dalam menyatukan setiap unsur partai mengikuti semua ketentuan dan mengajak semua pihak berpolitik dengan baik dan benar. (Ant)-f

Daya

Sambungan hal 1

Imbasnya daya beli juga tidak ada. Jika BBM naik, tapi upah tidak naik juga sama saja. Walaupun ada kenaikan UMK menurut Denta hanya beberapa persen. Kalaupun ada revisi UMK 2022 dan juga menuntut kenaikan UMK 2023 setidaknya 50 persen,” ujarnya.

BST BBM yang di programnya Pemda DIY nominalnya terlalu kecil dan tidak mampu menyokong daya beli masyarakat. Menurut Denta, hal itu hanya logika sesat dari pemerintah saat ini. Sesuai perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada 2021, UMK buruh DIY itu di angka Rp 3,5 juta. Akan tetapi yang diterapkan saat ini tidak sampai angka tersebut. Imbasnya, banyak buruh yang mengalami defisit ekonomi besar-besaran.

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri

Yudiana mengungkapkan kenaikan BBM memang jadi keprihatinan semua pihak. Karenanya hasil audiensi para buruh dan DPRD terkait penolakan kenaikan harga BBM yang sudah disampaikan tersebut akan disampaikan DPRD DIY ke Pemerintah Pusat. “Dari DPRD DIY sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya di sektor transportasi. Jangan sampai ada kenaikan tarif yang berkaitan dengan

Pemda DIY. Contohnya Trans Jogja. Jangan sampai ada kenaikan tarif, bahkan jika bisa menggratiskan bagi pelajar dan mahasiswa,” ungkapnya.

Sedangkan mahasiswa datang sore harinya. Mereka berorasi di luar Kantor DPRD DIY. Selain mahasiswa, orasi juga dilakukan oleh perwakilan pengemudi becak motor dan juga Pedagang Kaki Lima (PKL).

(Awh/Bro)-d

